Analisis Tentang Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Yunan Andika Putra^{1,2}, Lauddin Marsuni¹ & Abd Rahman¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: yunan.andika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kewenangan Penyelidikan yang dimiliki oleh KPPU adalah atribusi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, yang dalam pelaksanaannya, Komisi memberikan mandat Penyelidikan kepada Investigator Pemeriksaan untuk mendapatkan alat bukti yang cukup, tetapi hambatannya KPPU tidak mempunyai upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan untuk mendapatkan dokumen/surat yang dapat menjadi alat bukti; (2) Hukum persaingan usaha dapat berjalan dikarenakan telah memuat norma primer yang bersifat larangan dan norma sekunder tentang tata cara penanganan perkara yang dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pertama, klarifikasi terhadap laporan atau penelitian inisiatif, kedua, penyelidikan untuk mendapatkan alat bukti yang cukup, ketiga, pemeriksaan Majelis Komisi untuk membuktikan dugaan pelanggaran, dan keempat, penjatuhan Putusan Komisi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Persaingan Usaha, KPPU

ABSTRACT

The research aims to find out the enforcement of business competition law conducted by KPPU in Indonesia. The research method uses normative legal research methods. The results of this study indicate that: (1) The Investigative Authority possessed by KPPU is attribution through Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and has been strengthened through the Constitutional Court Decision Number 85 / PUU-XIV / 2016, which in its implementation, the Commission mandates Investigation to Investigate Investigators to obtain sufficient evidence, but the obstacle is that KPPU does not have compelled efforts such as searches and confiscation to obtain documents / letters that can serve as evidence; (2) The law of business competition can run because it contains primary norms that are prohibited and secondary norms concerning the procedures for handling cases which are carried out in four stages, namely first, clarification of reports or research initiatives, second, investigations to obtain sufficient evidence, third, examination of the Commission Council to prove the alleged violation, and fourth, the imposition of the Commission's Decision..

Keywords: Law enforcement; Business Competition, KPPU

PENDAHULUAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Lembaga tersebut bersifat independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Fadhilah, 2019). Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai fungsi untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, sampai dengan penjatuhan sanksi sehingga berfungsi sebagai lembaga penegak hukum (Mulyadi & Rusydi, 2017). Selain itu, KPPU juga diberikan kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Nurjaya, 2009).

Eksistensi KPPU telah terlihat dari banyaknya perkara yang ditangani, mulai dari pelanggaran persekongkolan tender, sampai dengan pelanggaran kartel yang melibatkan para pelaku usaha (Mantili, Kusmayanti & Afriana, 2016). Fungsi sebagai lembaga penegak hukum juga terlihat dari kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif yang berupa pembatalan perjanjian, kegiatan usaha, dan/atau penyalahgunaan posisi dominan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sampai dengan pengenaan denda administratif kepada pelaku usaha yang melanggar (Asshiddiqie, 2017).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha dapat terlihat pada saat penjatuhan sanksi terhadap 6 (enam) perusahaan ban yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI), yaitu :

1. PT. Bridgestone Tire Indonesia,
2. PT. Sumi Rubber Indonesia,
3. PT. Gajah Tunggal Tbk.,
4. PT. Goodyear Indonesia Tbk.,
5. PT. Elang Perdana Tyre Industry, dan
6. PT. Industri Karet Deli.

Proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU diperoleh fakta dalam rapat presidium dan *sales director's* (direktur pemasaran) APBI mengindikasikan adanya kesepakatan untuk menahan produksi, mengatur harga, tidak membanting harga, serta mengontrol distribusinya (Simanjuntak, 2018). Hasil dari proses pemeriksaan yang dilakukan KPPU diputuskan keenam perusahaan tersebut terbukti melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Santo, 2011).

Perkara lain yang ditangani KPPU dan menyita perhatian masyarakat luas adalah upaya penegakan hukum terkait dugaan kartel skuter matik 110-125 cc antara Yamaha dengan Honda yang diputus berdasarkan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016. Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan serta menjatuhkan putusan yang menyatakan Yamaha dan Honda secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memberikan sanksi denda

administratif sebesar Rp. 25 miliar kepada Terlapor I dan Rp. 22,5 miliar kepada Terlapor II. Walaupun putusan tersebut diajukan upaya hukum, tetapi hakim pada Pengadilan Negeri dengan Putusan No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr, dan Mahkamah Agung di tingkat kasasi dengan Putusan No. 217K/Pdt.Sus-KPPU/2019, telah menguatkan Putusan KPPU dan menolak permohonan keberatan serta kasasi yang diajukan oleh para Terlapor.

Perkara yang telah ditangani tersebut, sudah dapat terlihat bahwa yang menjadi objek pengawasan dan penegakan KPPU adalah pelaku usaha yang mempunyai pengaruh besar terhadap keberlangsungan suatu industri di Indonesia. Wewenang KPPU dalam proses penegakan hukum tersebut menyisakan celah yang belum diatur dalam undang-undangnya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur terkait dengan ketentuan umum, justru tidak ditemukan definisi penyelidik maupun penyelidikan, tetapi kemudian wewenang penyelidikan tersebut melekat kepada lembaga tersebut.

Definisi penyelidikan yang dilakukan terhadap persaingan usaha tidak sehat baru diatur dalam peraturan yang dibuat oleh KPPU, yaitu pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjelaskan penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Investigator Pemeriksaan untuk mendapatkan bukti yang cukup ([Handayani & Sulistiyo, 2020](#)).

Definisi Penyelidikan sebenarnya telah diatur ditataran undang-undang dan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ([Hasan, Zubaedah & Apriani, 2020](#)). Definisi tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pelaksana dalam kegiatan penyelidikan itu pun dilakukan oleh Penyelidik yang pada Pasal 1 angka 4 KUHP telah dijelaskan bahwa:

“Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Ketentuan tersebut telah memberikan gambaran secara jelas hubungan antara penyelidik dengan kegiatan penyelidikan dalam rangka penegakan hukum pidana

Definisi penyelidikan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memberikan dampak pada tidak jelasnya tata cara penanganan perkara. Wewenang Komisi hanya menyebutkan “penyelidikan dan atau pemeriksaan” dan pada ketentuan tata cara penanganan perkara dalam undang-undang tersebut, sama sekali tidak ditemukan frasa penyelidikan. Hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan pada tahapan yang mana wewenang penyelidikan tersebut ditempatkan. Padahal

harapannya dengan adanya aturan hukum formal dapat menjamin kepastian hukum dan berguna untuk menghindari penyalahgunaan wewenang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan tipe normatif melalui inventarisasi dan pencermatan terhadap bahan hukum. Analisa bahan hukum menggunakan jenis kualitatif untuk mendiskripsikan hasil penelitiannya. Teknik analisa dalam penelitian ini dengan melakukan pemrosesan satuan data, kategorisasi, dan penafsiran bahan hukum dalam upaya menemukan makna dan mendeskripsikan hubungan bahan hukum dengan kategorisasi yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Persaingan Usaha yang Dilakukan oleh KPPU di Indonesia

1. Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ketentuan tata cara penanganan perkara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengaturannya sangat singkat, sumir, dan hanya pokok-pokoknya saja, sehingga penerbitan peraturan komisi tersebut adalah untuk memberikan kejelasan terhadap prosedur penanganan perkara. Secara teori, tindakan KPPU tersebut masuk dalam wewenang bebas.

Penerbitan peraturan komisi tentang tata cara penanganan perkara oleh KPPU merupakan bentuk implementasi dari wewenang bebas yang berjenis interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage norm*). Penerbitan tersebut juga dilandasi salah satu tugas Komisi adalah menyusun pedoman dan atau publikasi, serta delegasi dari Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha bahwa tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi diatur lebih lanjut dengan keputusan komisi. Oleh karena itu, peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukan merupakan suatu produk peraturan perundang-undangan tetapi sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Peraturan komisi tentang tata cara penanganan perkara bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan tetapi keberadaannya mampu memperjelas ketentuan tentang tata cara penanganan perkara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga mempunyai relevansi hukum (Narinda, 2017). Berdasarkan tata cara penanganan perkara, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, secara umum proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU terhadap dugaan perilaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dijelaskan dalam empat tahapan, yaitu pertama, sumber perkara yang berasal dari laporan masyarakat maupun penelitian inisiatif. Kedua, penyelidikan untuk

mendapatkan bukti yang cukup. Ketiga, pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dan keempat, penjatuhan Putusan Komisi.

Gambar 7. Flowchart Penanganan Perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

a. Sumber Perkara

Sumber perkara persaingan usaha tidak sehat dapat berasal dari hasil klarifikasi laporan dari masyarakat dan/atau penelitian KPPU terhadap dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sumber perkara ini adalah tahapan awal KPPU dalam memulai proses penanganan perkara dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun perbedaan dari kedua kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perbedaan Klarifikasi Laporan dengan Penelitian

Klarifikasi Laporan	Penelitian KPPU
Berasal dari Laporan Masyarakat yang syarat kelengkapan laporan :	Inisiatif penelitian KPPU dapat berasal dari :
a. Identitas pelapor dan terlapor,	a. Hasil kajian;
b. Uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang, dan	b. Temuan dalam proses pemeriksaan;
c. Alat bukti dugaan pelanggaran.	c. Hasil Rapat Dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi;
	d. Laporan yang tidak lengkap;
	e. Berita di media; dan/atau
	f. Data atau informasi lain yang dapat

	dipertanggungjawabkan
Klarifikasi laporan dapat ditindaklanjuti ketahap selanjutnya, apabila memenuhi syarat :	Penelitian KPPU dapat ditindaklanjuti ketahap selanjutnya, apabila memenuhi syarat :
a. Kelengkapan administrasi laporan;	a. Kesesuaian kompetensi absolut Komisi;
b. Kejelasan dugaan pasal undang-undang yang dilanggar;	b. Deskripsi data dan/atau informasi yang valid tentang dugaan pelanggaran undang-undang;
c. Kesesuaian kompetensi absolut Komisi; dan	c. Kejelasan dugaan pasal undang-undang yang dilanggar; dan
d. Terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) alat bukti.	d. Terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) alat bukti.

b. Pengumpulan Alat Bukti.

Hasil klarifikasi laporan dan/atau penelitian KPPU yang memenuhi syarat, kemudian dilakukan kegiatan penyelidikan yang untuk mendapatkan bukti yang cukup yang dilakukan oleh Investigator Pemeriksaan.

c. Pemeriksaan.

Pemeriksaan merupakan tahapan pembuktian yang dilakukan terhadap temuan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Investigator Penuntutan maupun bantahan dari Terlapor terhadap tuduhan Investigator Penuntut dalam Laporan Dugaan Pelanggaran di depan Majelis Komisi. Pemeriksaan yang dilakukan terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu pertama, Pemeriksaan Pendahuluan (PP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran untuk menetapkan perubahan perilaku, menjatuhkan putusan atau menyimpulkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan (PL). Kedua, Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran.

d. Putusan Komisi.

Penjatuhan Putusan Komisi yang dilakukan terhadap suatu perkara yang ditangani KPPU. Putusan tersebut merupakan hasil penilaian Majelis Komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadinya pelanggaran dan penjatuhan sanksi atau tidak terjadinya pelanggaran. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPPU adalah tindakan administratif sesuai wewenangnya pada Pasal 36 huruf 1 dan jenisnya terbatas. Jenis tindakan administratif diatur melalui Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 telah memuat perubahan terhadap besaran denda administratif. Adapun perbedaan pengaturannya adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Perbedaan Sanksi Sebelum dan Setelah Perubahan

Ayat (2) huruf	Pasal 47 Sebelum Perubahan	Pasal 47 Setelah Perubahan
a.	penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau	penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;
b.	perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau	perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
c.	perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau	perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27;
d.	perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau	perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
e.	penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau	penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
f.	penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau	penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
g.	pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).	<i>pengenaan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i>

Putusan KPPU yang tidak diajukan upaya hukum keberatan maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaku usaha dianggap menerima putusan tersebut serta dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Apabila Putusan KPPU tidak dijalankan oleh Pelaku Usaha, Komisi menyerahkan tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terlapor yang keberatan dengan Putusan KPPU dapat mengajukan upaya hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang proses upaya hukum terhadap putusan KPPU juga mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Upaya hukum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Perbedaan Ketentuan Pasal 44 Sebelum dan Setelah Perubahan

Ayat	Pasal 44 Sebelum Perubahan	Pasal 44 Setelah Perubahan
(1)	Dalam waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.	Dalam waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
(2)	Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.	<i>Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.</i>
(3)	Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.	Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
(4)	Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)	Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.	Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Tabel 8. Perbedaan Ketentuan Pasal 45 Sebelum dan Setelah Perubahan

Ayat	Pasal 45 Sebelum Perubahan	Pasal 45 Setelah Perubahan
(1)	Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 hari setelah diterimanya	<i>Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 hari setelah diterimanya keberatan tersebut.</i>

	keberatan tersebut.	
(2)	Pengadilan Negeri harus memberikan Putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.	<i>Pihak yang keberatan dengan Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu 14 hari dapat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia</i>
(3)	Pihak yang keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu 14 hari dapat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia	<i>Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>
(4)	Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima.	-

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga penegakan hukum memiliki ciri khas yang menjadikannya bergerak di ranah hukum administrasi. Philipus Mandiri Hadjon memberikan pandangan terkait dengan ciri hukum administrasi negara dari sudut pandang sanksi jika dibandingkan dengan hukum pidana, yaitu pertama, dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana ditujukan pada pelaku. Kedua, sifat sanksi administrasi adalah *reparatoir-condemnatoir* yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan penjatuhan hukuman, sedangkan sanksi pidana hanya bersifat *condemnatoir*. Ketiga, prosedur penerapan sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, sedangkan sanksi pidana penerapan sanksinya harus melalui proses peradilan.

Tabel 9. Perbedaan Sanksi Administrasi dengan Sanksi Pidana

Perbedaan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana
Sasaran	Perbuatan	Pelaku
Sifat	<i>Reparatoir-Condemnatoir</i>	<i>Condemnatoir</i>
Prosedur	Langsung	Pengadilan

Ciri khas tersebut dapat terlihat bahwa sanksi dalam hukum persaingan usaha dapat dijatuhkan secara langsung oleh KPPU tanpa melalui proses peradilan. Sifat sanksi *reparatoir-condemnatoir* juga terlihat dalam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 47 undang-undang tersebut memenuhi sifat *reparatoir* yang dapat memerintahkan pelaku usaha menghentikan perilaku yang dilarang dan sifat *condemnatoir* yang dapat menjatuhkan sanksi berupa denda administrasi. Perbedaan proses penegakan hukum antara hukum persaingan usaha dengan hukum pidana maupun hukum perdata dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbedaan Proses Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata

No.	Perbedaan	Hukum Persaingan Usaha	Hukum Pidana	Hukum Perdata
1.	Sumber Perkara	a. Laporan Masyarakat b. Hasil Penelitian (Inisiatif)	Laporan Masyarakat dan Terjadinya Tindak Pidana	Terjadinya perselisihan antar pihak
2.	Proses Awal	Klarifikasi Laporan/ Penelitian Inisiatif dan Penyelidikan	Penyelidikan	(Gugatan Pihak yang dirugikan)
3.	Proses Pencarian Alat Bukti	Penyelidikan (Investigator Pemeriksaan)	Penyelidikan dan Penyidikan (Penyelidik dan Penyidik Kepolisian)	Dipersiapkan oleh Para pihak yang berselisih
4.	Proses Pemberkasan	Unit Kerja Bagian Pemberkasan (sampai dinyatakan telah lengkap dan sesuai)	Kejaksaan (sampai dinyatakan P21)	-
5.	Proses Persidangan	a. Penuntutan dilakukan oleh Investigator Penuntutan b. Terlapor dapat didampingi Kuasa Hukum c. Penilai dilaksanakan oleh Majelis Komisi (Anggota Komisi)	a. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa b. Terdakwa dapat didampingi Kuasa Hukum c. Penilai dilaksanakan oleh Hakim	a. Para pihak yang berselisih saling berhadapan b. Para pihak yang berselisih dapat didampingi kuasa hukum c. Penilai dilakukan oleh Hakim
6.	Penjatuhan Putusan	Majelis Komisi	Majelis Hakim	Majelis Hakim
7.	Upaya Hukum	a. Keberatan diajukan ke Pengadilan Niaga b. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung	a. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi b. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung c. Peninjauan Kembali diajukan ke Mahkamah Agung	a. Upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi b. Upaya hukum luar biasa yaitu verzet, derden verzet, dan peninjauan kembali

Alur penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh KPPU terlihat seperti lembaga *superbody* dikarenakan melakukan sebagian tugas dari Kepolisian (Investigator Pemeriksaan melakukan penyelidikan), tugas Kejaksaan (Investigator Penuntutan melakukan penuntutan), dan tugas Hakim (Majelis Komisi menjatuhkan putusan). seperti yang disampaikan oleh Kurnia Toha yang menyampaikan :

“...beberapa hal yang tidak tepat mengenai hukum acara yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diantaranya:

- 1) KPPU merupakan Lembaga *Superbody* karena dapat menyelidiki, menuntut dan mengadili;
- 2) KPPU sangat sulit untuk mendapatkan bukti sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 42 karena tidak ada kewenangan untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap tempat terkait dan menyimpan dokumen yang terkait dengan dugaan pelanggaran;
- 3) Tidak dikenalnya bukti tidak langsung dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- 4) Pembayaran denda didasarkan pada kesukarelaan pelaku usaha dan tidak ada kewenangan untuk menyita harta pelaku usaha sebagai ganti dari denda; dan
- 5) Tidak jelasnya penerapan prinsip *rule of reason* dalam putusan persaingan usaha.”

Pemberian mandat dari Komisi kepada Investigator untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan diatur melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga Komisi secara independen melakukan penilaian pada tahap Pemeriksaan Lanjutan dan menjatuhkan putusan. Penyelidikan sepenuhnya dilakukan oleh Investigator Pemeriksaan yang ditugaskan untuk melakukan pengumpulan alat bukti, sedangkan kegiatan pemberkasan atau membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan Pendahuluan serta mengajukan alat bukti, mengahdirkan sanksi dan menyampaikan kesimpulan pada Pemeriksaan Lanjutan merupakan tugas Investigator Penuntutan. Seperti yang disampaikan Ketua KPPU dalam Rapat dengan DPR RI bahwa “...bukan komisioner (yang membuat penyelidikan menjadi lama), karena komisioner baru bekerja pas sidang (pemeriksaan)”.

Independensi Majelis Komisi dapat terlihat dalam beberapa perkara yang menjatuhkan putusan tidak bersalah kepada Terlapor. Adapun beberapa putusan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-I/2010.

Putusan tersebut mengadili kasus Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berkaitan dengan penetapan harga dan kartel dalm industri semen. Terdapat 8 (delapan) pelaku usaha (Terlapor) yang diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat tersebut, yaitu :

- 1) PT. Indocement Tungal Perkasa, Tbk.,
- 2) PT. Holcim Indonesia, Tbk.,
- 3) PT. Semen Baturaja (Persero),
- 4) PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.,
- 5) PT. Semen Andalas Indonesia,
- 6) PT. Semen Tonasa,
- 7) PT. Semen Padang, dan
- 8) PT. Semen Bosowa Maros.

Majelis Komisi telah menjatuhkan amar putusan bahwa seluruh Terlapor dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016.

Putusan tersebut mengadili kasus Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam industri telekomunikasi terkait jasa telepon tetap, jasa internet dan jasa IP TV di Indonesia oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Terdapat 1 (satu) pelaku usaha (Terlapor) yang diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat tersebut, yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Majelis Komisi telah menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bahwa Terlapor dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

c. Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2018.

Putusan tersebut mengadili kasus Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perdagangan garam industri aneka pangan di Indonesia. Terdapat 7 (tujuh) pelaku usaha (Terlapor) yang diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat tersebut, yaitu :

- 1) PT. Garindo Sejahtera Abadi,
- 2) PT. Susanti Megah,
- 3) PT. Niaga Garam Cemerlang,
- 4) PT. Unichem Candi Indonesia,
- 5) PT. Cheetam Garam Indonesia,
- 6) PT. Budiono Madura Bangun Persada, dan
- 7) PT. Sumatraco Langgeng Makmur.

Majelis Komisi telah menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bahwa seluruh Terlapor dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

d. Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019.

Putusan tersebut mengadili kasus Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam hal ini terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Mitra Barito Gemilang oleh PT. Astra Agro Lestari, Tbk. Terdapat 1 (satu) pelaku usaha (Terlapor) yang diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat tersebut, yaitu PT. Astra Agro Lestari, Tbk. Majelis Komisi telah menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bahwa Terlapor dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham

Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan tersebut menandakan bahwa walaupun berada dalam satu lembaga, tetapi Investigator Pemeriksaan melaksanakan tugasnya mengumpulkan alat bukti yang cukup dan Investigator Penuntutan menilai layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilaporkan Rapat Komisi agar dapat diterbitkan Surat Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan serta Pembentukan Majelis Komisi. Peran Komisioner KPPU baru berjalan pada saat tahap Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan hasil penilaiannya melalui Putusan KPPU dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

Tabel 11. Pelaksana dalam Tahapan Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Tahapan	Pelaksana
Klarifikasi Laporan/Penelitian	Investigator Pemeriksaan
Penyelidikan	Investigator Pemeriksaan
Pemberkasan	Investigator Penuntutan
Pemeriksaan	Majelis Komisi dan Investigator Penuntutan
Putusan Komisi	Majelis Komisi

2. Bekerjanya Hukum Persaingan Usaha

Hukum bisa menjadi sebuah sistem yang mampu bekerja, selain memuat substansi atau kaidah yang bersifat perintah atau larangan, juga harus memuat ketentuan tentang bagaimana hukum itu dijalankan. H.L.A. Hart menyatakan bahwa: (Friedman, 2018)

“ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma perilaku dan peraturan sekunder adalah norma mengenai norma ini, yaitu tentang bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, dll.”

Beranjak dari pendapat tersebut maka dalam sistem hukum persaingan usaha dapat terlihat bahwa :

- peraturan primernya adalah terkait dengan perilaku larangan yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
- peraturan sekundernya adalah terkait dengan wewenang dan tata cara penanganan perkara sesuai dengan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pembuat undang-undang telah berusaha untuk menyatukan antara peraturan primer dengan peraturan sekunder ke dalam satu undang-undang. Kondisi yang mendesak dikarenakan tuntutan IMF pada waktu itu membuat tidak lengkapnya pengaturan dalam peraturan sekunder. KPPU kemudian menerbitkan peraturan lanjutan untuk memperjelas penerapan dan pelaksanaan dari peraturan sekunder

tersebut, sehingga diterbitkanlah peraturan komisi yang khusus mengatur tentang tata cara penanganan perkara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikeluarkan untuk merubah sistem perekonomian yang sentralistik menuju demokrasi ekonomi. Perubahan tersebut yang ditandai dengan adanya tuntutan reformasi dan pemenuhan persyaratan dari International Monetary Found. Pada saat pemerintahan orde baru berkuasa, hanya pelaku usaha atau kerabat yang dekat dengan penguasa yang menjalankan perekonomian bahkan diberikan hak monopoli oleh pemerintah sehingga sulit muncul pelaku usaha baru serta kesempatan berusaha tidak dimiliki secara merata.

Lahirnya undang-undang ini, terdapat faktor-faktor diluar hukum yang justru menjadi pendorong. Peranan negara pada pemerintahan orde baru tidak cukup untuk dapat memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha baik pada sektor produksi dan perdagangan karena struktur perekonomian yang cenderung monopoli, maka hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadikan hukum masuk ke bidang perekonomian nasional yang sebelumnya tidak diatur oleh negara. Hukum persaingan usaha dituntut bukan hanya menghilangkan perilaku praktek monopoli pelaku usaha, tetapi juga menjaga keberlangsungan persaingan usaha yang sehat agar tercipta iklim usaha yang kondusif.

Faktor-faktor sosial telah mempengaruhi hukum sehingga pemahaman akan bekerjanya hukum akan menjadi lengkap apabila memasukkan juga faktor-faktor sosial. Cara tersebut akan memunculkan hubungan antara hukum dengan variabel-variabel lain. Bekerjanya hukum persaingan usaha di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dengan munculnya faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi Hukum Persaingan Usaha dapat dijelaskan dengan menggunakan teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang digagas oleh Robert B. Seidman, yaitu sebagai berikut :

Gambar 9. Bekerjanya Hukum Persaingan Usaha

Dalam bagan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh DPR telah memberitahukan kepada pelaku usaha selaku pemegang peranan agar segala perilaku bisnisnya tidak bertentangan dengan peraturan tersebut.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga pembuat undang-undang telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembentukan undang-undang tersebut adalah tuntutan atau syarat agar dana IMF masuk ke Indonesia untuk dapat mengatasi krisis moneter. Sistem perekonomian yang sentralistik pada masa itu tidak mampu bertahan dari krisis moneter karena ketergantungan hutang luar negeri dan ketika dolar AS mengalami *overshooting* maka berdampak pada terjadinya krisis ekonomi. Kondisi tersebut memunculkan aksi demonstrasi yang menuntut adanya reformasi dan mundurnya Presiden Soeharto. Selain faktor IMF, dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, secara tidak langsung juga dipengaruhi faktor masyarakat dikarenakan reformasi adalah momen terbitnya hukum persaingan usaha.
- c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dibentuk untuk mengawasi penerapan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya. Pelaksanaan wewenang sesuai tata cara penanganan perkara dalam melaksanakan penegakan hukum, semata-mata untuk memenuhi tugas yang diberikan dalam undang-undang tersebut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selain bisa memulai perkara, berdasarkan penelitiannya sebagai bentuk dilakukannya pengawasan persaingan usaha, juga dapat memulai perkara berasal dari laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur setiap orang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Input dari masyarakat tersebut direspon oleh KPPU dengan pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha sesuai dengan tata cara penanganan perkara yang berlaku.
- d. Pemegang peranan disini dipegang pelaku Pelaku Usaha. Hal ini dikarenakan peraturan primer dalam bentuk larangan larangan perilaku ditujukan kepada pelaku usaha, bahkan dalam penerapan sanksi dari dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya dapat dikenakan kepada pelaku usaha.

Pelaku usaha sebagai pemegang peranan juga dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri, dikarenakan secara tidak langsung perilaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan berpengaruh terhadap masyarakat. Perilaku tersebut akan mengakibatkan keuntungan yang seharusnya diperoleh konsumen (masyarakat) dengan adanya persaingan usaha yang sehat akan berpindah kepada pelaku usaha dengan dilakukannya persaingan usaha tidak sehat. Walaupun persaingan akan berdampak terhadap pelaku usaha yang kalah di pasar tetapi

persaingan tetap sebagai mekanisme yang tepat dalam ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Sehingga pemegang peranan ini akan menerima peraturan primer dari lembaga pembentuk peraturan (DPR) dan ketika tidak dipatuhi maka akan menerima penerapan sanksi dari lembaga penerapan peraturan yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KESIMPULAN

Proses beracara terhadap perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh KPPU dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pertama, klarifikasi terhadap laporan atau penelitian inisiatif. Kedua, penyelidikan untuk mendapatkan alat bukti yang cukup. Ketiga, pemeriksaan Majelis Komisi untuk membuktikan dugaan pelanggaran. Keempat, penjatuhan Putusan Komisi. Walaupun, seluruh proses tersebut dilakukan oleh KPPU, tetapi pada prakteknya, Komisioner baru bekerja pada saat tahapan Pemeriksaan dan Penjatuhan Putusan. Pelaksana klarifikasi laporan dan penyelidikan tersebut dimandatkan kepada Investigator Pemeriksaan, sedangkan pada proses pemeriksaan, komisi hanya bekerja untuk memberikan penilaian disebabkan tugas untuk melakukan pemberkasan, pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi dan menyampaikan kesimpulan dibebankan kepada Investigator Penuntutan. Oleh karena itu, Putusan KPPU merupakan hasil penilaian majelis komisi secara independen terhadap tuntutan dan bantahan selama proses pemeriksaan.

SARAN

Berdasarkan analisa penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis .memberikan saran untuk dapat dilakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu menambah wewenang KPPU berupa penyidikan. Kewenangan penyidikan tersebut hanya dibatasi untuk dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan surat dan/atau dokumen yang diduga berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tetap menjaga kedudukan KPPU sebagai lembaga penegakan hukum di ranah hukum administrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Salle, S., & Djanggih, H. (2019). Corporate Responsibility Towards Employees' welfare: Case Study Pt Semeru Ratu Jaya Makassar. *Yuridika*, 34(1), 37-53.
- Asshiddiqie, J. (2017). Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi Peradilan. In *Prosiding Seminar Penegakan Ketentuan Hukum Persaingan Perihal Tender, Djokosoetono Research Center-Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Lawrence M. Friedman, 2018, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media, hlm. 16

- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55-72.
- Handayani, O., & Sulistiyono, A. (2020). Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 244-255.
- Hasan, F., Zubaedah, R., & Apriani, R. (2020). Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Sikap Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1(1), 105-126.
- Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(1), 116-132.
- Mulyadi, D., & Rusydi, I. (2017). Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 81-95.
- Narindra, M. D. (2017). Konsep Mendapatkan Alat Bukti Surat dan atau Dokumen dalam Penanganan Perkara Dugaan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Novum: Jurnal Hukum*, 4(2), 171-180.
- Nurjaya, I. K. K. (2009). Peranan Kppu dalam Menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan USAha Tidak Sehat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 83-90.
- Santo, P. A. F. D. (2011). Merger, Akusisi dan Konsolidasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Binus Business Review*, 2(1), 423-433.
- Simanjuntak, F. L. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim Agung Republik Indonesia Dalam Menangani Kasasi Perkara Kartel Putusan Kppu Yang Menggunakan Alat Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence). *Madani Legal Review*, 2(1), 71-101.